

# LAPORAN KINERJA



## BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



Independensi integritas profesionalisme



## KATA PENGANTAR



Sebagai salah satu unit pelaksana tugas Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia selaku unsur penyelenggara negara, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan wajib menyusun Laporan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Triwulan IV Tahun 2022 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis organisasi. Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2022 ini merupakan cermin dari pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan selama Tahun 2022.

Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan disusun dengan memedomani Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 286/K/X-XII.2/6/2017 tanggal 20 Juni 2017 tentang Pelaporan Kinerja pada Unit-Unit Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan. Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2022 ini memuat pencapaian dan evaluasi atas sasaran strategis yang telah ditetapkan target kinerja dalam Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.

Selanjutnya Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2022 ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.

**Banjarbaru, 31 Januari 2023**

**Kepala Perwakilan**

**H. Rahmadi S.E., M.M., Ak., CA, CSFA**  
**NIP. 196812101996031002**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR GAMBAR .....	3
DAFTAR TABEL.....	4
BAB I PENDAHULUAN.....	5
A. Latar Belakang.....	5
B. Tugas Dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan .....	5
C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.....	7
D. Sumber Daya BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan .....	8
E. Isu Strategis.....	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	13
A. Perencanaan Strategis .....	13
B. Target Kinerja .....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	19
IKU 1. Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan.....	22
IKU 2. Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan .....	22
IKU 3. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan.....	22
IKU 4. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	
23	
IKU 5. Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan .....	23
IKU 6. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	24
IKU 7. Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK .....	24
IKU 8. Hasil Evaluasi AKIP .....	24
IKU 9. Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi .....	25
IKU 10. Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan.....	25
IKU 11. Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi .....	26
IKU 12. Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi .....	27
IKU 13. Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran .....	27
BAB IV PENUTUP .....	46
A. Pencapaian Skor Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Secara Umum	46
B. Strategi Pemecahan Masalah serta Rencana Aksi Pemenuhan Target Periode Berikutnya	
46	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi .....	8
Gambar 2 Alur Pikir Renstra BPK Perwakilan Kalimantan Selatan 2020-2024.....	13
Gambar 3 Visualisasi Renstra BPK 2020-2024.....	15
Gambar 4 Visualisasi Renstra BPK Perwakilan Kalimantan Selatan 2020-2024 .....	15
Gambar 5 Grafik Skor Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan 2020-2022....	21
Gambar 6 Grafik Perkembangan Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2020 s.d. 2022.	44



2. Perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan;
4. Penyusunan program, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif;
5. Penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan;
6. Pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan;
8. Penyusunan bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan;
9. Pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK dan akuntan publik berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
10. Pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
11. Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dengan aparat pengawasan intern pada entitas diperiksa;
12. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan;
13. Penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
14. Penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
15. Penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi;
16. Pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;

17. Pemuktahiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP) dan Database Entitas Pemeriksaan (DEP) pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan;
18. Pelaksanaan pengelolaan risiko pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan;
19. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan; dan
20. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

### **C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan**

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan terdiri atas.

#### **1. Sekretariat Perwakilan**

Sekretariat Perwakilan bertugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.

Sekretariat Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan terdiri atas Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan, Subbagian Sumber Daya Manusia, Subbagian Keuangan, Subbagian Umum dan Teknologi Informasi dan Subbagian Hukum.

#### **2. Subauditorat Kalimantan Selatan I**

Lingkup tugas Subauditorat Kalimantan Selatan I adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Kuala, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut,

#### **3. Subauditorat Kalimantan Selatan II**

Lingkup tugas Subauditorat Kalimantan Selatan II adalah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut.

Tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Subauditorat Kalimantan Selatan I dan II adalah sebagai berikut.

- a. Merumuskan rencana kegiatan;
- b. Merumuskan rencana kegiatan;
- c. Melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
- d. Mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
- e. Menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
- f. Mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- g. Mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- h. Melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- i. Memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- j. Menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- k. Melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- l. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.

#### 4. Kelompok Pejabat Fungsional

Kelompok Pejabat Fungsional bertugas memberikan pelayanan fungsional sesuai dengan keahlian dan keterampilan tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Gambar 1 Struktur Organisasi

#### D. Sumber Daya BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan

##### 1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Berdasarkan data per 31 Desember 2022 BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan memiliki SDM sebanyak 142 orang, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1 Komposisi SDM

Uraian	Jumlah (orang)
Kepala Perwakilan	1
Kepala Subauditorat	2
Kepala Sekretariat Perwakilan	1
Kepala Subbagian	5
Pemeriksa	70
Pelaksana	28
Tenaga Tidak Tetap	19
CPNS Angkatan 2022	35
<b>Jumlah</b>	<b>142</b>



## 2. Sumber Daya Keuangan

Pada Tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan memperoleh pagu anggaran awal sebesar Rp22.267.526.000,00 yang terdiri dari anggaran untuk kegiatan pemeriksaan sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP) sebesar Rp7.410.211.000,00 dengan target keluaran 257 Laporan dan Rencana Kegiatan Setjen dan Penunjang (RKSP) sebesar Rp14.857.315.000,00 dengan target 106 Laporan. Adapun rincian anggaran RKP dan RKSP tersebut dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 2 Rincian Pagu RKP

No	Keluaran	Anggaran (Rp)	Target Keluaran
1	LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan	162.350.000	132 LHP
2	LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK Perwakilan	664.573.000	1 LHP
3	Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	8.885.000	1 Laporan
4	Sumbangan IHPS Perwakilan	48.906.000	2 Laporan
5	Laporan Profil Entitas Perwakilan	13.631.000	14 Laporan
6	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan	122.350.000	28 Laporan
7	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah pada BPK Perwakilan	151.121.000	28 Laporan
8	Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan	260.910.000	12 Laporan
9	LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan	3.311.462.000	19 LHP
10	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan	2.666.023.000	20 Laporan
	<b>Jumlah</b>	<b>7.410.211.000</b>	<b>257 Laporan</b>

Tabel 3 Rincian Pagu RKSP

No	Keluaran	Anggaran (Rp)	Target
<b>1</b>	<b>Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi</b>	<b>187.300.000</b>	<b>21 Unit</b>
<b>2</b>	<b>Layanan Perkantoran</b>	<b>12.538.269.000</b>	<b>1 Layanan</b>
a	Gaji dan Tunjangan	8.546.709.000	
b	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	3.991.560.000	
1)	Layanan Perkantoran Bidang TU	243.654.000	
2)	Layanan Perkantoran Bidang Kehumasan	38.400.000	
3)	Layanan Perkantoran Bidang SDM	569.318.000	
4)	Layanan Perkantoran Bidang Keuangan	227.712.000	
5)	Layanan Perkantoran Bidang Umum dan TI	2.631.443.000	
6)	Layanan Dukungan Sekretariat Perwakilan	281.033.000	
<b>3</b>	<b>Layanan Sarana Internal</b>	<b>707.620.000</b>	<b>64 Unit</b>
<b>4</b>	<b>Layanan Manajemen Internal Perwakilan</b>	<b>1.424.126.000</b>	<b>20 Laporan</b>
a	Layanan Tata Usaha	152.350.000	
b	Layanan Kehumasan	166.074.000	
c	Layanan SDM	236.646.000	
d	Layanan Keuangan	260.438.000	
e	Layanan Umum dan TI	303.785.000	
f	Layanan Hukum	182.487.000	
g	Dukungan Pembinaan Pimpinan BPK	91.800.000	
h	Pengelolaan Kinerja dan Manajemen Risiko	30.546.000	
	<b>Jumlah</b>	<b>14.857.315.000</b>	<b>106 Laporan</b>



## E. Isu Strategis

Rencana Strategis (Renstra) BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan 2020-2024 telah mengidentifikasi isu strategis yang menjadi perhatian, sebagai berikut.

1. Pemeriksaan merespons isu lokal dan berdasarkan pengaduan serta pemanfaatan informasi publik.

Salah satu upaya yang akan dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dalam menilai dan mendorong perbaikan terhadap program pembangunan pemerintah adalah dengan menyelaraskan tema pemeriksaan BPK dengan agenda pembangunan yang menjadi fokus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2020-2024 dengan mempertimbangkan implementasi agenda Sustainable Development Goals (SDGs) pada masing-masing agenda tersebut. Upaya penyelarasan tema pemeriksaan tersebut dilaksanakan melalui Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) pada Semester II Tahun 2022, yang mencakup Tematik Nasional (Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman pada dua entitas pemerintah kabupaten, dan Pengelolaan Sistem Pencegahan Korupsi pada entitas pemerintah provinsi), penanganan Covid-19 lanjutan atau signifikan lainnya (Program Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa/BLTDD pada satu entitas pemerintah kabupaten), tematik lokal (Belanja Daerah pada satu entitas Pemerintah Kota dan dua pemerintah kabupaten) dan mandiri (Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah/PAD, pada satu entitas pemerintah provinsi).

Kebijakan pemeriksaan ini merupakan bentuk peran aktif BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dalam menerapkan untuk perbaikan berkelanjutan pada level lokal. Hasil pemeriksaan ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam penyelesaian masalah-masalah lokal maupun pencapaian tujuan pembangunan di daerah.

Upaya pemenuhan isu strategis ini tercermin pada IKU Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional dan IKU Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal

2. Peningkatan *Quality Control* (QC) dan *Quality Assurance* (QA).

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan memuat opini, temuan, kesimpulan, dan rekomendasi sesuai dengan jenis pemeriksaan yang dilakukan. Untuk menghasilkan LHP yang berkualitas dan bermanfaat bagi lembaga perwakilan (DPRD Provinsi, Kota, dan Kabupaten) dan pimpinan entitas yang diperiksa (Gubernur, Walikota, dan Bupati) serta pemangku kepentingan lainnya, kualitas QC dan QA harus ditingkatkan secara berjenjang, secara internal dari Ketua Tim, Pengendali Teknis dan/atau Wakil Penanggung Jawab, dan Penanggung Jawab, dan secara eksternal dari Direktorat EPP dan Inspektorat Utama.

Upaya pemenuhan isu strategis ini tercermin pada IKU Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan.

3. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perlu Ditingkatkan

Tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan apresiasi pimpinan entitas atas hasil pemeriksaan BPK.



Selain itu tingkat tindak lanjut juga dapat menunjukkan efektivitas rekomendasi sebagai langkah perbaikan atas permasalahan yang ditemukan. Tingkat tindak lanjut yang rendah oleh pemangku kepentingan dapat dibaca sebagai rendahnya apresiasi pimpinan entitas terhadap hasil pemeriksaan BPK atau rekomendasi perbaikan atas permasalahan yang ditemukan sulit dan atau tidak dapat diterapkan oleh entitas.

Upaya pemenuhan isu strategis ini tercermin pada IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

#### 4. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan telah melaksanakan program peningkatan/pengembangan kompetensi pegawai secara reguler sebagai kebijakan yang terkait dengan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan ASN. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sehingga BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan telah menyusun kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi, melaksanakan pengembangan kompetensi, dan melaksanakan evaluasi pengembangan kompetensi.

Untuk tahapan pelaksanaan pengembangan kompetensi, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan telah melaksanakan pengembangan kompetensi berupa diklat secara mandiri, paling sedikit 1 (satu) kali setahun untuk pemeriksa, dan sesuai dengan jadwal diklat setiap triwulan dari Badiklat PKN. Selain itu, peningkatan kompetensi ASN dilakukan melalui kegiatan workshop, Focus Group Discussion (FGD), dan forum berbagi pengetahuan lainnya yang harus semakin sering dilakukan untuk meningkatkan kapasitas, kompetensi, dan profesionalisme ASN. Untuk tahapan evaluasi pengembangan kompetensi, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan telah melaksanakan evaluasi administratif untuk melihat kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pengembangan kompetensi. Hal tersebut dilakukan dengan monitoring dan evaluasi pencapaian jam diklat setiap bulan, triwulan, dan tahunan.

Upaya pemenuhan isu strategis ini tercermin pada IKU Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi dan IKU Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan.

#### 5. Terdapat komponen penilaian kinerja anggaran yang belum tepat dan dinamika kegiatan yang memengaruhi pencapaian realisasi anggaran.

Kinerja pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dicantumkan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) berikut Rincian Kertas Kerja Satker (RKKS) atau Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) diukur dan dievaluasi secara berkala oleh Biro Keuangan dan Direktorat PSMK serta dan Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen terus meningkatkan kualitas perbendaharaan dengan meningkatkan pengendalian intern untuk meningkatkan nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran, dengan mengikutsertakan manajemen dan pegawai yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelola keuangan secara transparan dan akuntabel.



BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan menerapkan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan anggaran satuan kerja mulai dari merencanakan anggaran kebutuhan yang dibutuhkan satuan kerja untuk mencapai kinerja yang direncanakan, dengan menerapkan kombinasi pendekatan Zero Based Budgeting (ZBB) dan Performance Based Budgeting (PBB).

Upaya pemenuhan isu strategis ini tercermin pada IKU Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran.

#### 6. Integrasi Sistem Informasi BPK

Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi dan Informasi (TI), BPK telah mengembangkan aplikasi, antara lain e-KKP (e-Working Paper) yang termasuk dalam aplikasi Sistem Informasi Aplikasi Pemeriksaan (SiAP). SiAP LKPD merupakan awal penerapan e-KKP yang pada awalnya digunakan untuk pemeriksaan atas LKPD.

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan telah menggunakan aplikasi SiAP LKPD pada semua entitas pemeriksaan LKPD, yakni sebanyak 14 (empat belas) entitas yang terintegrasi dengan aplikasi tersebut.

Selain aplikasi SiAP, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan telah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SiPTL) yaitu aplikasi penginputan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang telah diterapkan pada seluruh entitas, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala eksternal (rotasi pegawai, minimnya kemampuan jaringan internet di daerah) yang perlu pembinaan secara berkesinambungan.

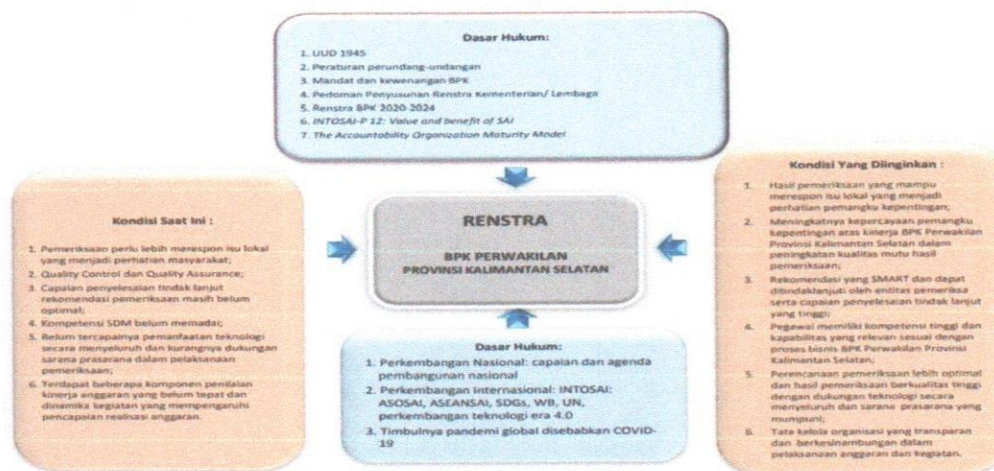
Selanjutnya BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan telah memanfaatkan aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP) yang digunakan untuk mendokumentasikan aktivitas Pemeriksa pada tahap perencanaan, pelaksanaan pekerjaan lapangan, dan pelaporan. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan telah menggunakan aplikasi SMP untuk penginputan penugasan, tindak lanjut, dan data pemeriksaan.

Upaya pemenuhan isu strategis ini tercermin pada IKU Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. Perencanaan Strategis

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai salah satu satker pelaksana BPK berkomitmen sepenuhnya untuk mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran strategis BPK serta turut melaksanakan nilai-nilai dasar BPK. Rencana Strategis (Renstra) BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan 2020-2024 disusun selaras dengan Renstra BPK 2020-2024 dalam rangka meningkatkan peran dan manfaat BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan bagi para pemangku kepentingan yang didukung dengan penguatan kapasitas organisasi. Alur pikir pengembangan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan 2020-2024 dibangun dengan memperhatikan empat hal yang terdiri atas dasar hukum, lingkungan strategis, kondisi saat ini dan kondisi yang diinginkan. Alur pikir pengembangan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan 2020-2024 dapat diilustrasikan pada gambar berikut.



Gambar 2 Alur Pikir Renstra BPK Perwakilan Kalimantan Selatan 2020-2024

Visi BPK sebagaimana tertuang dalam Renstra BPK 2020-2024 adalah “Menjadi Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara”. Melalui visi ini, BPK berupaya mengoptimalkan mandatnya untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Sebagai lembaga negara, BPK akan menunjukkan perannya secara aktif melalui pemeriksaan sebagai bentuk pelaksanaan mandat dan proses bisnis utama. Oleh karena perannya yang semakin luas, BPK harus meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan sehingga mampu memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan tata kelola keuangan negara. Dalam rangka mencapai visi misi tersebut, BPK menetapkan Misi BPK 2020-2024 sebagai berikut.

1. Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan;
2. Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan



3. Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

Dukungan pada pernyataan misi pertama yaitu BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya mengoptimalkan tugasnya untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Kota/Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.

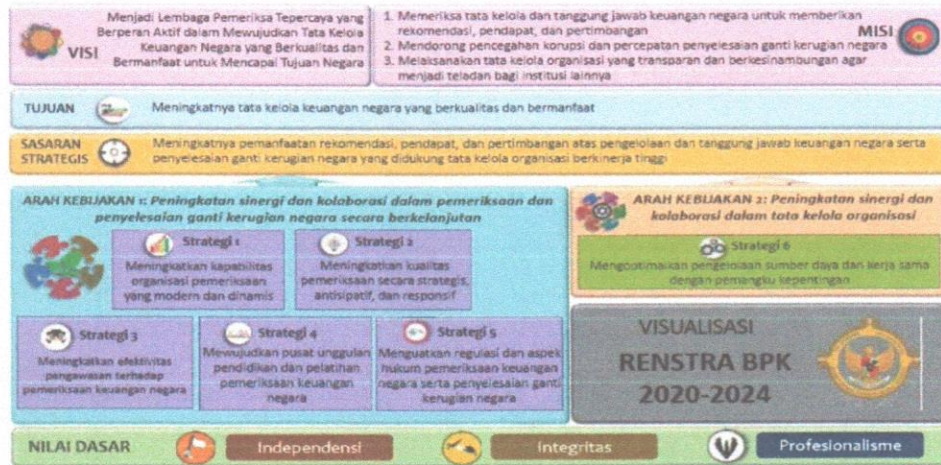
Dukungan pada misi kedua yaitu BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan akan berperan aktif mendorong pencegahan korupsi dan meningkatkan percepatan penyelesaian ganti kerugian.

Dukungan pada misi ketiga yaitu BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan berupaya mewujudkan penguatan transparansi dan akuntabilitas tata kelola melalui reformasi birokrasi sebagai komitmen melakukan perbaikan dan peningkatan dalam organisasi. Upaya ini diwujudkan dengan optimalisasi sumber daya organisasi pada setiap aspek, mengembangkan budaya integritas, independen dan profesional, serta mengimplementasikan dan mereplikasi praktik-praktik terbaik dalam mendukung penguatan nilai tambah organisasi.

Pencapaian visi dan pelaksanaan misi tersebut dilakukan dengan tujuan “Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat”. Selaras dengan tujuan BPK, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan tujuan “Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat”. Tujuan tersebut membawa semangat bahwa pelaksanaan mandat pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara harus memberikan dampak positif bagi para pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi, misi dan tujuannya, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan Sasaran Strategis 2020-2024 “Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi”. Melalui sasaran strategis ini, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan ingin menjamin peningkatan mutu pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang sesuai dengan standar sehingga diharapkan dapat menciptakan kepercayaan publik terhadap akuntabilitas kinerja BPK.

Selanjutnya, untuk mencapai Sasaran Strategis, BPK merumuskan arah kebijakan dan strategi. Bentuk visualisasi hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi dapat dilihat pada gambar berikut.



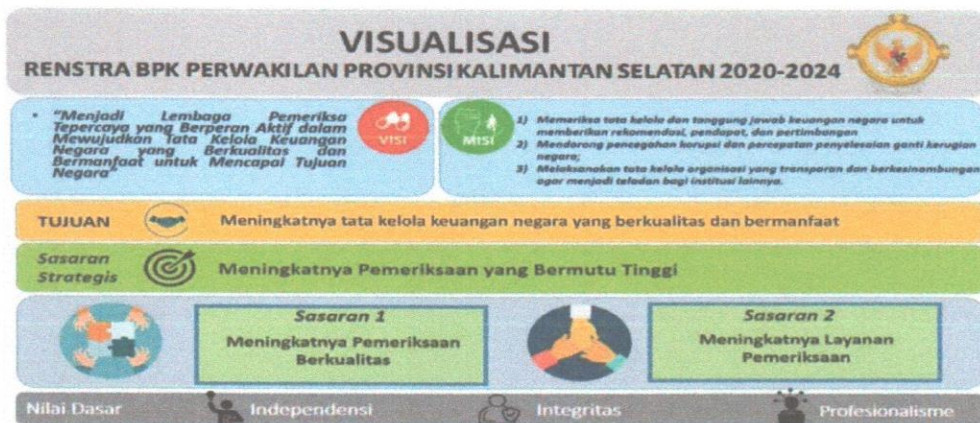
Gambar 3 Visualisasi Renstra BPK 2020-2024

Sebagai unit kerja pemeriksaan pada AKN VI, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan sangat mendukung Strategi 2 yaitu “Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan secara Strategis, Antisipatif dan Responsif yang bertujuan untuk meningkatkan kematangan organisasi ke level insight dan foresight, serta memantapkan peran BPK untuk menjadi *focal point* dalam berkontribusi mengawal pelaksanaan RPJMN 2020-2024 dan implementasi SDG’s sebagai agenda internasional.

Dalam Renstra 2020-2024, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan memiliki Sasaran Strategis untuk meningkatkan pemeriksaan yang bermutu tinggi dengan sasaran sebagai berikut.

1. Meningkatkan pemeriksaan berkualitas; dan
2. Meningkatnya layanan pemeriksaan.

Bentuk visualisasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan 2020-2024 adalah sebagai berikut.



Gambar 4 Visualisasi Renstra BPK Perwakilan Kalimantan Selatan 2020-2024



Untuk mengukur keberhasilan Sasaran Strategis “Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi”, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan indikator-indikator kinerja yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut.

- 1) Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan;
- 2) Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan;
- 3) Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan;
- 4) Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional;
- 5) Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan;
- 6) Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal;
- 7) Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK;
- 8) Hasil Evaluasi AKIP;
- 9) Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi;
- 10) Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan;
- 11) Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi;
- 12) Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi; dan
- 13) Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran.

## B. Target Kinerja

### 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Untuk mengukur pencapaian Sasaran Strategis yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan telah menyusun indikator dan target kinerja Tahun 2022 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) yang ditandatangani oleh Auditor Utama Keuangan Negara VI dan Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, serta diketahui oleh Ketua BPK, Wakil Ketua BPK dan Anggota VI BPK.

Berikut Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022.

Tabel 4 Target Pencapaian Kinerja Tahun 2022

Sasaran Kegiatan, Sasaran	Anggaran		Indikator Kinerja Utama	Target
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	Rp22.267.526.000	1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%
• Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas; dan	Rp7.410.211.000	2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%
• Meningkatnya Layanan Pemeriksaan	Rp14.857.315.000	3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
		4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%
		5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%

6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%
7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)
8	Hasil Evaluasi AKIP	A (88,00)
9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	97%
10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%
11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)
12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%
13	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	88%

## 2. Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja Tahun 2022

Laporan Pencapaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan periode Triwulan IV Tahun 2022 meliputi pencapaian 13 IKU yaitu:

1. IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan
2. IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan
3. IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
4. IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional
5. IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan
6. IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal
7. IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK
8. IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP
9. IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi
10. IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan
11. IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi
12. IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi
13. IKU 13 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran



## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Hasil Evaluasi AKIP

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Evaluasi implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Instansi kerja pemerintah.

Secara umum, tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP adalah:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
4. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Evaluasi atas implementasi SAKIP dilaksanakan terhadap lima komponen Akuntabilitas Kinerja yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, dan Capaian Kinerja.

Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 memperoleh predikat **AA (Sangat Memuaskan)**.

Evaluasi terhadap komponen Perencanaan Kinerja mencakup dua subkomponen yaitu Perencanaan Strategis dan Perencanaan Kinerja Tahunan, menunjukkan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan telah memenuhi capaian organisasi sehingga kondisi ini diharapkan dapat dipertahankan.

Evaluasi terhadap komponen Pengukuran Kinerja mencakup tiga subkomponen yaitu Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, dan Implementasi Pengukuran, menunjukkan adanya hal yang perlu mendapat perhatian yakni monitoring pencapaian target kinerja baru dilakukan sampai dengan level Eselon II, atau belum dilakukan untuk Eselon III, IV, dan individu.

Evaluasi terhadap komponen Pelaporan Kinerja mencakup tiga subkomponen yaitu Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, dan Pemanfaatan Informasi Kinerja, menunjukkan adanya hal-hal yang perlu mendapat perhatian, yakni.

1. LAKIN menyajikan evaluasi dan analisis capaian kinerja untuk sebagian indikator kinerja;
2. LAKIN belum menyajikan perbandingan capaian tahun berjalan dengan capaian tahun sebelumnya;
3. LAKIN belum menyajikan informasi besaran efisiensi penggunaan sumber daya keuangan.

Evaluasi terhadap komponen Evaluasi Internal mencakup tiga subkomponen yaitu Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, dan Pemanfaatan Evaluasi, menunjukkan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan telah memenuhi capaian organisasi sehingga kondisi ini diharapkan dapat dipertahankan.

Evaluasi terhadap komponen Capaian Kinerja berupa subkomponen Kinerja yang Dilaporkan (Output), menunjukkan adanya target yang tidak tercapai, dan capaian kinerja yang tidak lebih baik dari tahun sebelumnya.

Terhadap hasil evaluasi tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan diharapkan melakukan perbaikan terutama pada komponen Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Capaian Kinerja melalui koordinasi dengan Direktorat PSMK dan satuan kerja terkait, serta meningkatkan kualitas penyajian LAKIN, capaian kinerja terhadap seluruh target yang telah ditetapkan, dan mendokumentasikan proses tindak lanjut rekomendasi Inspektorat Utama.

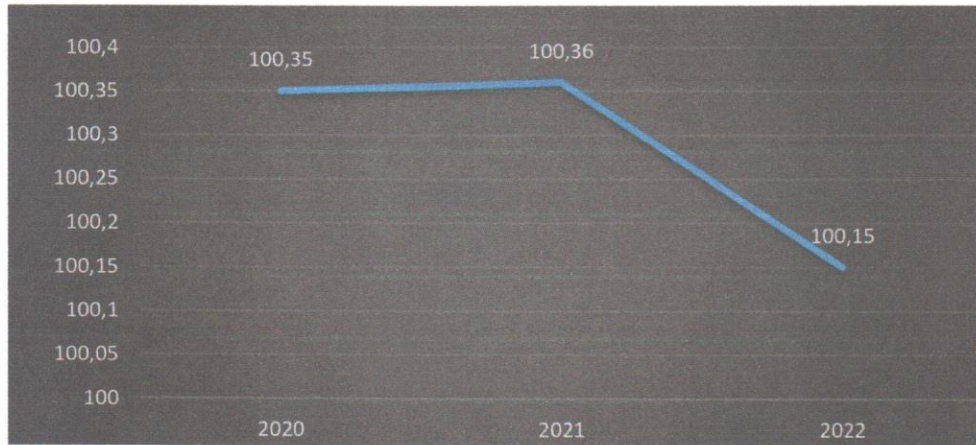
## **B. Capaian Kinerja**

Laporan Pencapaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan periode Triwulan IV Tahun 2022 meliputi pencapaian 13 IKU, yaitu :

1. IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan
2. IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan
3. IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
4. IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional
5. IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan
6. IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal
7. IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK
8. IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP
9. IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi
10. IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan
11. IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi
12. IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi
13. IKU 13 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran



Pada Tahun 2022, skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 100,15. Skor tersebut mengalami penurunan bila dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2021 yaitu sebesar 100,36. Skor capaian kinerja menunjukkan tren yang dapat disajikan pada gambar berikut.



Gambar 5 Grafik Skor Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan 2020-2022

Berdasarkan gambar di atas Pencapaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Triwulan IV Tahun 2022 diukur berdasarkan pencapaian atas 13 IKU yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 6 Pencapaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Triwulan IV Tahun 2022

Indikator Kinerja Utama	Target PK 2022	Rencana Pencapaian Kinerja	Realisasi Pencapaian Kinerja	Skor IKU
		Triwulan IV	Triwulan IV	Triwulan IV
<b>Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan</b>				<b>100,42</b>
<b>Strategi Meningkatnya Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif</b>				
<b>Sasaran Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi</b>				
1. Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan dan Mutu Pemeriksaan	100%	100%	89,33%	89,33
2. Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100
3. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	80,11%	105
4. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100%	101,32%	101,32
5. Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100
6. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	100,48%	100,48
7. Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	5,00	4,67	93,40
8. Hasil Evaluasi AKIP	A (88,00)	A (88,00)	92,30	104,89
9. Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	97%	97%	93,56%	96,45
10. Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	120%	105
11. Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	3,80	4,35	105
12. Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%	100
13. Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	88,00%	88,00%	89,35%	101,50



Pencapaian kinerja di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut.

### **IKU 1. Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan**

IKU ini bertujuan untuk mendorong kualitas pengendalian mutu pemeriksaan. Penilaiannya dilakukan dengan mengukur pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan pada tiga tingkatan, yaitu internal satuan kerja melalui hasil *Quality Assurance* (QA) dan *Quality Control* (QC) maupun eksternal melalui hasil evaluasi Direktorat EPP dan hasil revidu Inspektorat Utama.

Target PK Tahun 2022 untuk IKU ini adalah sebesar 100% dan target berdasarkan Rencana Aksi Triwulan IV sebesar 100%. Realisasi pada Triwulan IV Tahun 2022 adalah sebesar 89,33% dan belum memenuhi target berdasarkan rencana aksi.

Pada Tahun 2022 skor IKU Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 89,33 mengalami penurunan dari skor kinerja Tahun 2021 sebesar 90,67.

Rencana perbaikan yang akan dilakukan untuk memperbaiki capaian dan skor IKU ini adalah melakukan evaluasi atas hasil QA dan QC, dan melakukan koordinasi dengan Direktorat EPP dan Inspektorat Utama.

### **IKU 2. Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan**

IKU ini bertujuan untuk mendorong satuan kerja pemeriksaan agar meningkatkan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Penilaiannya dilakukan dengan menunjukkan hasil evaluasi atas kesesuaian simpulan dalam LHP dengan harapan penugasan yang tertuang dalam Program Pemeriksaan (P2).

Target PK Tahun 2022 untuk IKU ini adalah sebesar 100% dan target berdasarkan Rencana Aksi Triwulan IV sebesar 100%. Realisasi pada Triwulan IV adalah sebesar 100% dan telah memenuhi target berdasarkan rencana aksi.

Pada Tahun 2022 skor kinerja IKU Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 100, sama dengan skor kinerja Tahun 2021 sebesar 100.

Rencana yang akan dilakukan untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan capaian dan skor IKU ini adalah memenuhi kesesuaian simpulan dalam LHP dengan harapan penugasan yang tertuang dalam P2 melalui revidu berjenjang P2 dari Tim Pemeriksa, Pengendali Teknis dan/atau Wakil Penanggung Jawab untuk memperoleh persetujuan Penanggung Jawab dan/atau Pemberi Tugas.

### **IKU 3. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan**

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaan *auditee* atas rekomendasi BPK melalui penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Penilaiannya dilakukan dengan menunjukkan tingkat kepatuhan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang diharapkan berdampak pada perbaikan tata kelola keuangan negara.

Target PK Tahun 2022 untuk IKU ini adalah sebesar 75% dan target berdasarkan Rencana Aksi Triwulan IV sebesar 75%. Realisasi pada Triwulan IV Tahun 2022 adalah sebesar 80,11% dan telah memenuhi target berdasarkan rencana aksi. Realisasi sebesar 80,11%



berdasarkan jumlah rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 10.884, jumlah rekomendasi yang belum selesai atau masih dalam proses tindak lanjut sebanyak 2.637, jumlah rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sebanyak 181, jumlah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak 466, dan jumlah rekomendasi yang telah disampaikan ke auditee sebanyak 14.168.

Pada Tahun 2022 skor kinerja IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 105 sama dengan skor kinerja Tahun 2021 sebesar 105.

Rencana yang akan dilakukan untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan capaian dan skor IKU ini adalah melakukan komunikasi dengan pimpinan dan jajaran entitas yang diperiksa untuk mempercepat penyelesaian rekomendasi yang belum sesuai atau masih dalam proses dan yang belum ditindaklanjuti. Diharapkan dengan komunikasi diketahui kendala dan alternatif solusi atas kendala yang dihadapi dalam penyelesaian rekomendasi.

#### **IKU 4. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional**

IKU ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik nasional atas isu strategis, RPJMN/D serta SDG's. Penilaiannya dilakukan dengan menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional/lokal.

Target PK Tahun 2022 untuk IKU ini adalah sebesar 100% dan target berdasarkan Rencana Aksi Triwulan IV sebesar 100%. Realisasi pada Triwulan IV Tahun 2022 sebesar 101,32% dan telah memenuhi target berdasarkan rencana aksi.

Pada Tahun 2022 skor kinerja IKU Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 101,32 mengalami peningkatan dari skor kinerja IKU 4 Tahun 2021 sebesar 100,43.

Rencana yang akan dilakukan untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan capaian dan skor IKU ini adalah melakukan pemenuhan keterlibatan Pemeriksaan Tematik Nasional dalam Rencana Kerja Pemeriksaan (RKP) BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan sesuai Rencana Kerja Tahunan (RKT) BPK.

#### **IKU 5. Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan**

IKU ini bertujuan untuk mengukur jumlah permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan yang ditindaklanjuti BPK. Penilaiannya dilakukan dengan menunjukkan sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan seperti Lembaga Perwakilan dan Instansi Penegak Hukum (IPH). Pemenuhan pemeriksaan ini menunjukkan tingkat responsif BPK dalam memenuhi permintaan dari pemangku kepentingan.

Target PK Tahun 2022 untuk IKU ini adalah sebesar 100% dan target berdasarkan Rencana Aksi Triwulan IV sebesar 100%. Realisasi pada Triwulan IV Tahun 2022 adalah sebesar 100% dan telah memenuhi target berdasarkan rencana aksi.

Pada Tahun 2022 skor kinerja IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 100 sama dengan skor kinerja Tahun 2021 sebesar 100.



Rencana yang akan dilakukan untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan capaian dan skor IKU ini adalah melakukan pemenuhan pemeriksaan dari pemangku kepentingan pada RKP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dengan tetap memperhatikan RKT BPK dan ketersediaan sumber daya.

#### **IKU 6. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal**

IKU ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan atas tematik lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D, dan SDG's. Penilaiannya dilakukan dengan menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional/lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D, dan SDG's.

Target PK Tahun 2022 untuk IKU ini adalah sebesar 100% dan target berdasarkan Rencana Aksi Triwulan IV sebesar 100,48% dan telah memenuhi target berdasarkan rencana aksi.

Pada Tahun 2022 skor kinerja IKU Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 100,48 mengalami peningkatan dari skor kinerja Tahun 2021 sebesar 100,39.

Rencana yang akan dilakukan untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan capaian dan skor IKU ini adalah melakukan pemenuhan keterlibatan dalam Pemeriksaan Tematik Lokal pada RKP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dengan tetap memperhatikan RKT BPK.

#### **IKU 7. Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK**

IKU ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana Pegawai BPK memahami visi dan misi serta nilai-nilai dasar BPK. Penilaiannya dilakukan dengan mengukur tingkat pemahaman visi, misi, dan nilai-nilai dasar seluruh pegawai BPK yang dilakukan melalui survei. Indikator penilaian ini merupakan dasar bagi pengembangan budaya organisasi BPK.

Target PK Tahun 2022 untuk IKU ini adalah sebesar 5,00 dengan kategori sangat memuaskan. Realisasi pada Triwulan IV Tahun 2022 adalah Sangat Memuaskan dengan nilai sebesar 4,67 dan belum memenuhi target berdasarkan rencana aksi.

Pada Tahun 2022 skor kinerja IKU Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 93,40 mengalami peningkatan dari skor kinerja Tahun 2021 sebesar 89,8.

Rencana yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian dan skor IKU ini adalah melakukan kegiatan diseminasi atas visi dan misi serta nilai-nilai dasar BPK kepada pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, dengan harapan menambah pemahaman pegawai terhadap visi dan misi serta nilai-nilai dasar BPK.

#### **IKU 8. Hasil Evaluasi AKIP**

IKU ini bertujuan untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja satuan kerja di BPK. Evaluasi AKIP merupakan evaluasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Utama pada seluruh satuan kerja di BPK.



Target PK Tahun 2022 untuk IKU ini adalah A dengan nilai 88,00. Realisasi pada Triwulan IV Tahun 2022 adalah AA dengan nilai 92,30 dan telah memenuhi target berdasarkan rencana aksi.

Pada Tahun 2022 skor kinerja IKU Hasil Evaluasi AKIP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 104,89 mengalami penurunan dari skor kinerja Tahun 2021 sebesar 105.

Rencana yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian dan skor IKU ini adalah melakukan perbaikan atas kualitas Laporan Kinerja dan SAKIP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.

### **IKU 9. Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi**

IKU ini bertujuan untuk mendorong satuan kerja agar memanfaatkan layanan Teknologi dan Informasi (TI) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap pegawai sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas serta efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Target PK Tahun 2022 untuk IKU ini adalah sebesar 97% dan target berdasarkan Rencana Aksi Triwulan IV sebesar 97%. Realisasi tingkat pemanfaatan teknologi dan informasi pada Triwulan IV Tahun 2022 adalah sebesar 93,56% dan belum memenuhi target berdasarkan rencana aksi. Realisasi tersebut meliputi pemanfaatan SISDM sebesar 99,25%; JASMIN sebesar 68,53%; SMP sebesar 93,48% ; SiAP sebesar 98,65% dan SiPTL sebesar 100,00%.

Pada Tahun 2022 skor kinerja IKU Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 96,45 mengalami penurunan dari skor kinerja IKU Tahun 2021 sebesar 102,46.

Rencana yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian dan skor IKU ini adalah meningkatkan peran aktif pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan untuk memanfaatkan TI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, baik pemeriksaan maupun non pemeriksaan.

### **IKU 10. Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan**

IKU ini bertujuan untuk mengukur sampai sejauh mana satuan kerja mampu mempraktikkan manajemen pengetahuan khususnya pada identifikasi pengetahuan, penciptaan pengetahuan, penyimpanan pengetahuan, berbagi pengetahuan dan penerapan pengetahuan. Proses identifikasi pengetahuan ini mencakup praktik terbaik (*best practice*). *Best practice* (BP) adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melalui proses validasi dan pengesahan oleh satuan kerja yang berwenang. Penerapan BP merupakan implementasi atas BP yang telah melalui proses validasi dan ditetapkan untuk implementasi oleh unit/satuan kerja selain pengusul BP.

Target PK Tahun 2022 untuk IKU ini adalah sebesar 100% dan target berdasarkan Rencana Aksi Triwulan IV sebesar 100%. Realisasi pada Triwulan IV Tahun 2022 adalah sebesar 120% dan melebihi target berdasarkan rencana aksi.

Realisasi sebesar 120% merupakan pelaksanaan manajemen pengetahuan sebanyak 25 aktivitas, yaitu Diklat Pemeriksaan atas LKPD Tahun Anggaran 2021; Pelatihan Pra



Penugasan Bagi KAP yang Bekerja Untuk dan Atas Nama BPK pada Pemeriksaan LKPD TA 2021 Sesi *Off Class* di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan; Bantuan Rekan Sejawat dengan Tema Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Penyedia Barang dan Jasa Instansi Pemerintah; *Coaching* Pegawai a.n. Hafiz Majidi; *Coaching* Pegawai a.n. Rendhy Prasetyo Hadi; *Coaching* Pegawai a.n. Anisa Letisia Permata Sari; *Coaching* Pegawai a.n. Faisal Fahlepi; Forum Berbagi Pengetahuan atau *Knowledge Transfer Forum* (KTF) dengan Tema *Application of Professional Scepticism*; Forum Berbagi Pengetahuan atau *Knowledge Transfer Forum* (KTF) dengan Tema *Flexible Working Arrangements*; Forum Berbagi Pengetahuan berupa Sosialisasi Perubahan Mekanisme Presensi Online; Reviu Pasca Aktivitas Rekonsiliasi Penilaian DUPAK JFP periode penilaian s.d. Desember 2021 atau kenaikan pangkat April 2022; dan Evaluasi Kegiatan Rekonsiliasi Penilaian DUPAK JFP periode penilaian s.d. Desember 2021 atau kenaikan pangkat April 2022; Wawancara Berbasis Pengetahuan dengan pegawai a.n. Syafrezza Athariq; Wawancara Berbasis Pengetahuan dengan pegawai a.n. Rindhang Pundhilaras; Forum Berbagi Pengetahuan berupa pemaparan (ekspose) dan sosialisasi dengan topik "Panduan Aplikasi Pendukung Pemeriksaan, Reviu Silang Konsep LHP, dan Usulan Penetapan Status Rekomendasi yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan menjadi Terpidana"; Forum Berbagi Pengetahuan berupa pemaparan (ekspose) dan sosialisasi dengan topik "Kode Etik BPK, serta *Core Values* dan *Employee Branding* ASN"; Blogging dengan topik "Pentingnya Penerapan Skeptisisme Profesional oleh Setiap Pemeriksa"; Blogging dengan topik "Tantangan Pemeriksaan di Era Revolusi 4.0. Apakah kita sanggup menghadapinya?"; dan Mentoring 35 CPNS Tahun 2022; Workshop *Introduction Data Analytics*; Diklat Pelayanan Prima; Sosialisasi Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Forum Berbagi Pengetahuan berupa *Knowledge Transfer Forum* (KTF) Peran BPK di INTOSAI *Working Group on Environmental Auditing* (WGEA); Komunitas Praktisi Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) dengan topik "Pemeriksaan Infrastruktur Gedung dan Bangunan atas Pekerjaan Tanah dan Pondasi; dan Evaluasi Kegiatan Rekonsiliasi Penilaian DUPAK JDP periode penilaian s.d Juni 2022 atau Kenaikan Pangkat Oktober 2022.

Pada Tahun 2022 skor kinerja IKU Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 105 mengalami peningkatan dari skor kinerja IKU Tahun 2021 sebesar 100.

Rencana yang akan dilakukan untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan capaian dan skor IKU ini adalah meningkatkan peran aktif pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan untuk menerapkan dan mempraktikkan manajemen pengetahuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

#### **IKU 11. Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi**

IKU ini bertujuan untuk mendorong BPK Perwakilan agar meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerja sama, dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di lingkungan perwakilan. Penilaiannya dilakukan dengan melakukan survei atas kepuasan para pemangku kepentingan dengan kualitas komunikasi yang dilakukan oleh perwakilan. Target PK Tahun 2022 untuk IKU ini adalah 3,80 dengan kategori memuaskan. Realisasi



pada Triwulan IV Tahun 2022 adalah sebesar 4,35 dan telah memenuhi target berdasarkan rencana aksi.

Pada Tahun 2022 skor kinerja IKU Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 105 dan mengalami peningkatan skor kinerja IKU Tahun 2021 sebesar 100.

Rencana yang akan dilakukan untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan capaian dan skor IKU ini adalah meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerja sama, dan komunikasi yang sudah terjalin baik dengan para pemangku kepentingan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

### **IKU 12. Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi**

IKU ini bertujuan untuk mendorong pelaksanaan tugas dan fungsi dengan pemenuhan persyaratan kompetensi dalam bentuk pendidikan berkelanjutan pegawai BPK.

Target PK Tahun 2022 untuk IKU ini adalah sebesar 100% dan target berdasarkan Rencana Aksi Triwulan IV sebesar 100%. Realisasi pemenuhan jam diklat pengembangan kompetensi pegawai pada Triwulan IV Tahun 2022 sebesar 100% dan telah memenuhi target berdasarkan rencana aksi.

Pada Tahun 2022 skor kinerja IKU Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 100 sama dengan skor kinerja IKU Tahun 2021 sebesar 100.

Rencana yang akan dilakukan untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan capaian dan skor IKU ini adalah mendorong peran aktif pegawai untuk meningkatkan kompetensi melalui keikutsertaan pada diklat sesuai dengan tugas dan fungsi.

### **IKU 13. Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran**

IKU ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan tersebut. Tingkat kinerja anggaran ini mengukur capaian kinerja atas penggunaan anggaran satuan kerja yang memiliki DIPA mandiri yang dilihat dari nilai evaluasi kinerja anggaran dan nilai evaluasi pelaksanaan anggaran.

Target PK Tahun 2022 untuk IKU ini adalah sebesar 88% dan target berdasarkan Rencana Aksi Triwulan IV sebesar 88%. Realisasi tingkat kinerja implementasi anggaran pada Triwulan IV Tahun 2022 sebesar 89,32% dan telah memenuhi target berdasarkan rencana aksi. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) sebesar 85,96% dan nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) sebesar 94,35%.

Pada Tahun 2022 skor kinerja IKU Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 101,50 mengalami penurunan dari skor kinerja IKU Tahun 2021 sebesar 104,43.

Rencana yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian dan skor IKU ini adalah memperbaiki kualitas pelaksanaan anggaran melalui indikator-indikator EKA dan EPA.

Adapun perbandingan realisasi tahun 2022 dengan realisasi tiga tahun terakhir sebagaimana tabel berikut.

Tabel 7 Perbandingan Realisasi Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020, 2021, dan 2022

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sasaran Meningkatkan Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	89,33%	90,67%	89,29%
	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%
	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	80,11%	78,94%	78,99%
	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	101,32%	100,43%	100,82%
	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%
	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100,48%	100,39%	100%
	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	4,67	4,49	4,57
	Hasil Evaluasi AKIP	A (88,00)	AA (92,30)	AA (93,14)	AA (94,80)
	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	97%	93,56%	98,36%	98,36%
	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	120%	100%	200%
	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	4,35	3,95	3,72
	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%	100%
	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	88,00%	89,32%	91,38%	91,07%

Selanjutnya, perbandingan realisasi tahun pelaporan dengan target lima tahun sebagaimana tabel berikut.

Tabel 8 Perbandingan Realisasi Tahun 2022 dengan Target Lima Tahun

No	Indikator Kinerja	Tahun Kinerja Lima Tahun					Realisasi Tahun 2022	Capaian Tahun 2022 terhadap Target Akhir Renstra (Tahun 2024)
		2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	89,33%	Belum memenuhi
2.	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Memenuhi
3.	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%	80,11%	Memenuhi
4.	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100%	100%	100%	100%	101,32%	Memenuhi
5.	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Memenuhi



6.	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	100%	100%	100%	100,48%	Memenuhi
7.	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,67	Belum Memenuhi
8.	Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	A (90,05)	AA (92,30)	Memenuhi
9.	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	96%	97%	98%	100%	93,56%	Belum Memenuhi
10.	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100%	100%	100%	120%	Memenuhi
11.	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	4,35	Memenuhi
12.	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Memenuhi
13.	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	87%	87%	87%	87%	87%	89,32%	Memenuhi

Adapun penjelasan capaian indikator kinerja tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut.

### 1. IKU 1. Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan

Indikator ini bertujuan untuk mendorong kualitas pengendalian mutu pemeriksaan dengan mengukur pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan pada tiga tingkatan, yaitu internal satuan kerja melalui hasil *Quality Assurance* (QA) dan *Quality Control* (QC) maupun eksternal melalui Hasil Evaluasi EPP dan Hasil Reviu Itama.

Hasil QA dan QC merupakan pemenuhan QC pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa (PFP) dan QA dalam pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksa (PSP).

Hasil evaluasi EPP merupakan evaluasi atas tingkat akurasi dan konsistensi atas LHP yang diterbitkan.

Hasil Reviu Itama merupakan penilaian terhadap dokumentasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan yang dilakukan pada seluruh satuan kerja pemeriksaan dengan metode *sampling*.

Realisasi capaian IKU Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan Tahun 2022 dibandingkan dengan capaian tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 9 Perbandingan IKU 1 Tahun 2022 dan 2021

Indikator Kinerja 2022	Target 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
1. Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	89,33%	90,67%

Berdasarkan pengukuran, realisasi IKU Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan pada Tahun 2022 sebesar 89,33%, **lebih rendah dari target** yang ditetapkan sebesar 100%.

Capaian tersebut diukur melalui tiga sub IKU, yaitu

- (1) Sub IKU 1.1 tentang Hasil QA dan QC dengan realisasi sebesar 100 %;
- (2) Sub IKU 1.2 tentang Hasil Evaluasi EPP dengan realisasi sebesar 100 %; dan

(3) Sub IKU 1.3 tentang Hasil Reviu Itama dengan realisasi sebesar 100%. Pada Tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan QA dan QC berjenjang atas 23 LHP yang telah diterbitkan. Selain itu, capaian Hasil Evaluasi LHP yang dilakukan oleh Direktorat Evaluasi dan Perencanaan Pemeriksaan (EPP) sebesar 100%. Capaian tersebut terdiri atas tingkat konsistensi atas LHP sebesar 46,67% dan tingkat akurasi LHP sebesar 100%. Capaian ini masih di bawah target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%. Adapun capaian Hasil Reviu Itama yaitu sebesar 100%. Hasil ini menunjukkan bahwa dokumentasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan belum sesuai dengan pedoman yang berlaku. Perbandingan capaian IKU ini terhadap target jangka menengah adalah sebagai berikut.

Tabel 10 Perbandingan Realisasi IKU 1 terhadap Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja 2022		Target					Realisasi 2022	Realisasi 2022 Dibanding Target Kinerja 2024
		2020	2021	2022	2023	2024		
IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	89,33%	89,33%

Berdasarkan tabel di atas, capaian IKU ini jika dibandingkan dengan target jangka menengah Tahun 2024 belum memenuhi target yang diharapkan.

Dalam rangka pemenuhan target tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan berusaha meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan agar diperoleh kesesuaian pelaksanaan pemeriksaan BPK dengan SPKN, Kode Etik dan PMP.

Salah satu upaya efisiensi yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan adalah dengan meningkatkan akurasi dan konsistensi dalam penyusunan LHP secara berjenjang dari Ketua Tim sampai dengan Penanggung Jawab sehingga dapat meningkatkan nilai perolehan evaluasi.

## 2. IKU 2. Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan

Indikator ini menunjukkan hasil evaluasi atas kesesuaian simpulan dalam LHP yang diterbitkan oleh satuan kerja pemeriksaan dengan harapan penugasan yang tertuang dalam Program Pemeriksaan (P2). Indikator kinerja ini bertujuan untuk mendorong satuan kerja pemeriksaan agar meningkatkan kualitas LHP.

Realisasi capaian IKU ini Tahun 2022 dibandingkan dengan capaian tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 11 Perbandingan IKU 2 Tahun 2022 dan 2021

Indikator Kinerja 2022		Target 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%



Pencapaian IKU ini pada Tahun 2022 sebesar 100 % atau telah **memenuhi target** yang telah ditetapkan.

Hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan Laporan Evaluasi Direktorat EPP, simpulan dalam 23 LHP yang telah diterbitkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan telah sesuai dengan harapan penugasan yang tertuang dalam P2.

Perbandingan capaian IKU 2 terhadap target jangka menengah adalah sebagai berikut.

Tabel 12 Perbandingan Realisasi IKU 2 terhadap Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja 2022		Target					Realisasi 2022	Realisasi 2022 Dibanding Target Kinerja 2024
		2020	2021	2022	2023	2024		
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas, capaian IKU ini jika dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024 telah memenuhi target yang diharapkan.

### 3. IKU 3. Presentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaan *auditee* atas rekomendasi BPK melalui penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dapat memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah dilakukan kepada entitas yang diperiksa.

Realisasi capaian IKU ini pada Tahun 2022 dibandingkan dengan capaian Tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 13 Perbandingan IKU 3 Tahun 2022 dan 2021

Indikator Kinerja 2022		Target 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	80,11%	78,94%

Pencapaian IKU ini pada Tahun 2022 sebesar 80,11% atau **telah memenuhi target** yang telah ditetapkan.

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan telah memanfaatkan secara penuh Sistem Pemantauan Tindak Lanjut (SiPTL) dalam melakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan.

Adapun pencapaian IKU ini pada Tahun 2022 dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Jumlah rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 10.884;
2. Jumlah rekomendasi yang belum selesai/masih dalam proses ditindaklanjuti sebanyak 2,637;
3. Jumlah rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sebanyak 181;

4. Jumlah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak 466;
5. Jumlah rekomendasi yang telah disampaikan kepada *auditee* sebanyak 14.168.

Data tersebut merupakan data yang bersumber dari Direktorat EPP berdasarkan data IHPS Semester II Tahun 2022.

Perbandingan capaian IKU 3 terhadap target menengah adalah sebagai berikut.

Tabel 14 Perbandingan Realisasi IKU 3 terhadap Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja 2022	Target					Realisasi 2022	Realisasi 2022 Dibanding Target Kinerja 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%	80,11%	80,11%.

Berdasarkan tabel di atas, capaian IKU ini jika dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024 telah memenuhi target yang diharapkan.

Hal ini menunjukkan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan secara optimis dapat memenuhi target sampai Tahun 2024 dengan terus berperan aktif dalam mendorong pemerintah daerah untuk terus meningkatkan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.

Upaya efisiensi yang dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan adalah dengan pemanfaatan teknologi dan informasi berupa Sistem Pemantauan Tindak Lanjut (SiPTL) dan Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP). Manfaat yang diperoleh berupa kemudahan akses bagi satker dalam rangka pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.

#### 4. IKU 4. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional

Indikator ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik nasional berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's.

Realisasi capaian IKU ini pada Tahun 2022 dibandingkan dengan capaian Tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 15 Perbandingan IKU 4 Tahun 2022 dan 2021

Indikator Kinerja 2022	Target 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	101,32%	100,43%

Realisasi IKU ini pada Tahun 2022 sebesar 101,32% telah memenuhi target dari yang ditetapkan yaitu sebesar 100%.

Pada Tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan telah melaksanakan pemeriksaan tematik nasional sebanyak 5 objek pemeriksaan yaitu : (1) Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Kabupaten Banjar dalam



Menyediakan Akses Air Minum yang Layak dan Aman serta Penyediaan Sarana Prasarana Sanitasi untuk Mendukung Kesehatan Lingkungan Tahun 2021 s.d Semester I 2022 pada Pemerintah Kabupaten Banjar dan Instansi Terkait Lainnya; (2) Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam Menyediakan Akses Air Minum yang Layak dan Aman serta Penyediaan Sarana Prasarana Sanitasi untuk Mendukung Kesehatan Lingkungan Tahun 2021 s.d Semester I 2022 pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan Instansi Terkait Lainnya; (3) Pemeriksaan atas Kepatuhan Pengelolaan BLT Desa, Hibah, dan Bansos TA 2022 pada Pemerintah Kabupaten Balangan; (4) Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah untuk Menanggulangi Kemiskinan Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Instansi Terkait Lainnya, di Banjarbaru dan Banjarmasin; (5) Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Melalui Pelaksanaan Aksi Pembentukan UKPBJ, E-Payment dan E-Katalog serta Percepatan Sistem Merit Tahun Anggaran 2019 s.d Semester I 2022 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan dan Instansi Terkait Lainnya.

Tabel 16 Perbandingan Realisasi IKU 4 terhadap Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja 2022	Target					Realisasi 2022	Realisasi 2022 Dibanding Target Kinerja 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100%	100%	100%	100%	101,32%	101,32%

Berdasarkan tabel di atas, capaian IKU ini jika dibandingkan dengan target jangka menengah Tahun 2024 telah memenuhi target yang diharapkan.

Salah satu upaya efisiensi yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan adalah dengan pemanfaatan teknologi dan informasi layanan Aplikasi Pemeriksaan berupa SIAP Kinerja. Manfaat yang diperoleh berupa kemudahan akses bagi satker dalam rangka penyelesaian dan arsip atas kerja kerja pemeriksaan.

## 5. IKU 5. Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan

Indikator ini bertujuan mengukur jumlah permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan yang ditindaklanjuti BPK. Realisasi IKU 5 Tahun 2022 sebesar 100 %. Selama Tahun 2022, tidak ada permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan.

Realisasi capaian IKU ini pada Tahun 2022 dibandingkan dengan capaian tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 17 Perbandingan IKU 5 Tahun 2022 dan 2021

Indikator Kinerja 2022	Target 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%

Tabel 18 Perbandingan Realisasi IKU 5 terhadap Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja 2022	Target					Realisasi 2022	Realisasi 2022 Dibanding Target Kinerja 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas, capaian IKU ini jika dibandingkan dengan target jangka menengah Tahun 2024 telah memenuhi target yang diharapkan.

## 6. IKU 6. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal

Indikator ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan atas tematik lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's. Realisasi IKU ini pada Tahun 2022 sebesar 100,48% telah memenuhi target dari yang ditetapkan yaitu sebesar 100,48%.

Realisasi capaian IKU ini pada Tahun 2022 dibandingkan dengan capaian Tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 19 Perbandingan IKU 6 Tahun 2022 dan 2021

Indikator Kinerja 2022	Target 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100,48%	100,39%

Tabel 20 Perbandingan Realisasi IKU 6 terhadap Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja 2022	Target					Realisasi 2022	Realisasi 2022 Dibanding Target Kinerja 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	100%	100%	100%	100,48%	100,48%

Berdasarkan tabel di atas, capaian IKU ini jika dibandingkan dengan target jangka menengah Tahun 2024 telah memenuhi target yang diharapkan.

Salah satu upaya efisiensi yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan adalah dengan pemanfaatan teknologi dan informasi layanan Aplikasi pemeriksaan berupa SIAP Kinerja. Manfaat yang diperoleh berupa kemudahan akses bagi satker dalam rangka penyelesaian dan arsip atas kerja kerja pemeriksaan.

## 7. IKU 7. Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK

Indikator ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana Pegawai BPK dapat memahami visi, misi dan nilai dasar BPK. Anggaran Tahun 2022 semula



Rp22.267.526.000, yang kemudian direvisi menjadi sebesar Rp23.034.983.000 dan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp23.027.398.000.

Realisasi capaian IKU ini pada Tahun 2022 dibandingkan dengan capaian tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 21 Perbandingan IKU 7 Tahun 2022 dan 2021

Indikator Kinerja 2022		Target 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	4,67	4,49

Realisasi IKU ini pada Tahun 2022 sebesar 4,57 dengan kategori Sangat Memuaskan namun belum memenuhi target dari yang ditetapkan yaitu sebesar 5,00 dengan kategori Sangat Memuaskan.

Tabel 22 Perbandingan Realisasi IKU 7 terhadap Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja 2022		Target					Realisasi 2022	Realisasi 2022 Dibanding Target Kinerja 2024
		2020	2021	2022	2023	2024		
7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,67	4,67

Berdasarkan tabel di atas, capaian IKU ini jika dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024 telah memenuhi target yang diharapkan.

Salah satu upaya efisiensi yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan adalah dengan berpartisipasi aktif dalam pengukuran indikator berbasis digital. Hal tersebut bermanfaat bagi internal BPK antara lain penghematan anggaran, responden lebih banyak sehingga survei lebih representatif dan hasil survei *realtime*.

## 8. IKU 8. Hasil Evaluasi AKIP

Evaluasi AKIP merupakan evaluasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Utama pada seluruh satuan kerja di BPK. Indikator ini bertujuan untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja satuan kerja di BPK.

Sesuai Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 12 Tahun 2015, nilai AKIP dikategorikan sebagai berikut.

- AA = Sangat Memuaskan (>90-100)
- A = Memuaskan (>80-90)
- BB = Sangat Baik (>70-80)
- B = Baik (>60-70)
- CC = Cukup (>50-60)
- C = Kurang (>30-50)
- D = Sangat Kurang (0-30)

Berdasarkan Nota Dinas Inspektur Utama Nomor 239/ND/XI/07/2022 tanggal 27 Juli 2022, pencapaian IKU ini Tahun 2022 adalah AA (Sangat Memuaskan) dengan skor 92,30 dan **telah memenuhi target** yang telah ditetapkan. Namun jika dibandingkan dengan Tahun 2021, nilai ini mengalami penurunan. BPK Perwakilan

Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen untuk meningkatkan capaian target dengan terus memperhatikan rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan oleh Itama atas evaluasi AKIP.

Realisasi capaian IKU ini pada Tahun 2022 dibandingkan dengan capaian Tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 23 Perbandingan IKU 8 Tahun 2022 dan 2021

Indikator Kinerja 2022		Target 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
8	Hasil Evaluasi AKIP	A (88,00)	AA (92,30)	AA (93,14)

Realisasi IKU ini Tahun 2022 sebesar 92,30 (AA) dan telah memenuhi target dari yang ditetapkan yaitu sebesar 88,00 (A).

Tabel 24 Perbandingan Realisasi IKU 8 terhadap Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja 2022	Target					Realisasi 2022	Realisasi 2022 Dibanding Target Kinerja 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
8 Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	A (90,05)	AA (92,30)	AA (92,30)

Berdasarkan tabel di atas, capaian IKU ini jika dibandingkan dengan target jangka menengah Tahun 2024 telah memenuhi target yang diharapkan. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan akan terus melakukan perbaikan terhadap penyajian Laporan Kinerja tahun-tahun berikutnya dengan memperhatikan rekomendasi yang telah disampaikan sehingga tersaji informasi yang informatif dan relevan.

Salah satu upaya efisiensi yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan adalah dengan memanfaatkan portal intranet BPK dalam melakukan evaluasi dan penilaian SAKIP melalui *prisma-sakip.bpk.go.id*.

#### 9. IKU 9. Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

BPK melalui Biro TI telah menyediakan layanan TI bagi seluruh pegawai yang meliputi layanan dasar (email, e-Drive, portal), layanan aplikasi umum (SISDM), serta layanan aplikasi pemeriksaan (SMP, SIAP, SIPTL). Untuk mendorong *IT Culture* di BPK, seluruh satuan kerja diharapkan memanfaatkan layanan yang disediakan ini secara optimal, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam organisasi BPK.

Indikator ini bertujuan untuk mendorong satuan kerja agar memanfaatkan layanan TI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Realisasi capaian IKU ini Tahun 2022 dibandingkan dengan capaian tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 25 Perbandingan IKU 9 Tahun 2022 dan 2021

Indikator Kinerja 2022		Target 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	97%	93,56%	98,36%



Realisasi IKU ini Tahun 2022 sebesar 93,56% dan belum memenuhi target dari yang ditetapkan yaitu sebesar 97,00%. Penilaian IKU ini terdiri atas tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SISDM sebesar 19,85%; tingkat pemanfaatan layanan aplikasi JASMIN sebesar 10,28%; tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SMP sebesar 18,70%; tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SIAP sebesar 19,73%; dan tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SIPTL sebesar 25,00%.

Tabel 26 Perbandingan Realisasi IKU 9 terhadap Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja 2022		Target					Realisasi 2022	Realisasi 2022 Dibanding Target Kinerja 2024
		2020	2021	2022	2023	2024		
9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	96%	97%	98%	100%	93,56%	93,56%

Berdasarkan tabel di atas, capaian IKU ini jika dibandingkan dengan target jangka menengah Tahun 2024 belum memenuhi target yang diharapkan. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan akan berupaya untuk meningkatkan pemanfaatan TI dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Salah satu upaya efisiensi yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan adalah dengan menerapkan *IT Culture* melalui pemanfaatan layanan dasar (email, e-Drive, portal), layanan aplikasi umum (SISDM), serta layanan aplikasi pemeriksaan (SMP, SIAP, SIPTL) yang telah disediakan oleh Biro TI. Manfaat yang dirasakan yaitu berupa kemudahan akses serta peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam organisasi BPK.

#### 10. IKU 10. Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan

Manajemen Pengetahuan dipandang sebagai upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan pengetahuan secara efektif dalam suatu organisasi.

Proses identifikasi pengetahuan ini mencakup praktik terbaik (*best practice*). *Best Practice* (BP) adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melalui proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. Penerapan BP merupakan implementasi atas BP yang telah melewati proses validasi dan ditetapkan untuk diimplementasi oleh unit/satuan kerja selain pengusul BP. Aktivitas manajemen pengetahuan merupakan metode yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan *sharing*/penyebaran informasi/pengetahuan.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur sampai sejauh mana satuan kerja mempraktekkan manajemen pengetahuan, penyimpanan pengetahuan, berbagi pengetahuan dan penerapan pengetahuan.

Realisasi capaian IKU ini Tahun 2022 dibandingkan dengan capaian Tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 27 Perbandingan IKU 10 Tahun 2022 dan 2021

Indikator Kinerja 2022		Target 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	120%	100%

Realisasi IKU ini pada Tahun 2022 sebesar 120% telah memenuhi target dari yang ditetapkan yaitu sebesar 100 %. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan telah menyusun usulan *best practice* sebanyak 1 usulan, menerapkan *best practice* sebanyak 1 dan telah melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan sebanyak 25 aktivitas.

Pada Tahun 2022, capaian Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan adalah sebesar 120% atau **telah memenuhi target**. Adapun pencapaian realisasi ini berdasarkan realisasi Sub IKU berikut.

- a. Realisasi Sub IKU 10.1 tentang Tingkat Penyusunan/Penerapan BP sebesar 100%. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan menyusun BP yang berjudul “Tamukita sebagai Wadah Layanan Penerima Tamu dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan”. Berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Direktorat PSMK tanggal 26 Januari 2023, diketahui bahwa usulan dan replikasi *best practice* sebagai capaian Indikator Kinerja “Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan” Tahun 2022 pada satuan kerja terkait dapat diakui.
- b. Realisasi Sub IKU 10.2 tentang Tingkat Pelaksanaan Aktivitas Manajemen Pengetahuan (MP) sebesar 120%. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan telah melaksanakan aktivitas MP sebanyak 25 aktivitas sebagai berikut.
  - Diklat Pemeriksaan atas LKPD Tahun Anggaran 2021;
  - Pelatihan Pra Penugasan Bagi KAP yang Bekerja Untuk dan Atas Nama BPK pada Pemeriksaan LKPD TA 2021 Sesi Off Class di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan;
  - Bantuan Rekan Sejawat dengan Tema Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Penyedia Barang dan Jasa Instansi Pemerintah;
  - Coaching Pegawai a.n. Hafiz Majidi;
  - Coaching Pegawai a.n. Rendhy Prasetyo Hadi;
  - Coaching Pegawai a.n. Anisa Letisia Permata Sari;
  - Coaching Pegawai a.n. Faisal Fahlepi;
  - Forum Berbagi Pengetahuan atau Knowledge Transfer Forum (KTF) dengan Tema Application of Professional Scepticism;
  - Forum Berbagi Pengetahuan atau Knowledge Transfer Forum (KTF) dengan Tema Flexible Working Arrangements;
  - Forum Berbagi Pengetahuan berupa Sosialisasi Perubahan Mekanisme Presensi Online;
  - Reviu Pasca Aktivitas Rekonsiliasi Penilaian DUPAK JFP periode penilaian s.d. Desember 2021 atau kenaikan pangkat April 2022;
  - Evaluasi Kegiatan Rekonsiliasi Penilaian DUPAK JFP periode penilaian s.d. Desember 2021 atau kenaikan pangkat April 2022;
  - Wawancara Berbasis Pengetahuan dengan pegawai a.n. Syafrezza Athariq;



- Wawancara Berbasis Pengetahuan dengan pegawai a.n. Rindhang Pundhilaras;
- Forum Berbagi Pengetahuan berupa pemaparan (ekspose) dan sosialisasi dengan topik "Panduan Aplikasi Pendukung Pemeriksaan, Reviu Silang Konsep LHP, dan Usulan Penetapan Status Rekomendasi yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan menjadi Terpidana";
- Forum Berbagi Pengetahuan berupa pemaparan (ekspose) dan sosialisasi dengan topik "Kode Etik BPK, serta Core Values dan Employee Branding ASN";
- Blogging dengan topik "Pentingnya Penerapan Skeptisisme Profesional oleh Setiap Pemeriksa";
- Blogging dengan topik "Tantangan Pemeriksaan di Era Revolusi 4.0. Apakah kita sanggup menghadapinya?";
- Mentoring 35 CPNS Tahun 2022;
- Workshop Introduction to Data Analytics;
- Diklat Pelayanan Prima;
- Sosialisasi Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- Forum Berbagi Pengetahuan berupa Knowledge Transfer Forum (KTF) Peran BPK di INTOSAI Working Group on Environmental Auditing (WGEA);
- Komunitas Praktisi Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) dengan topik "Pemeriksaan Infrastruktur Gedung dan Bangunan atas Pekerjaan Tanah dan Pondasi";
- Evaluasi Kegiatan Rekonsiliasi Penilaian DUPAK JDP periode penilaian s.d Juni 2022 atau Kenaikan Pangkat Oktober 2022;

Tabel 28 Perbandingan Realisasi IKU 10 terhadap Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja 2022	Target					Realisasi 2022	Realisasi 2022 Dibanding Target Kinerja 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100%	100%	100%	120%	120%

Berdasarkan tabel di atas, capaian IKU ini jika dibandingkan dengan target jangka menengah Tahun 2024 telah memenuhi target yang diharapkan. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan akan terus berupaya untuk mempertahankan capaian IKU ini.

#### 11. IKU 11. Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi

Tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi adalah tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pemangku kepentingan atas hubungan, Kerjasama, dan komunikasi yang dilakukan oleh perwakilan.

Indikator ini bertujuan untuk mendorong perwakilan agar meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerja sama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di lingkungan perwakilan.

Realisasi capaian IKU ini Tahun 2022 dibandingkan dengan capaian Tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 29 Perbandingan IKU 11 Tahun 2022 dan 2021

Indikator Kinerja 2022		Target 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	4,35	3,95

Realisasi IKU ini pada Tahun 2022 sebesar 4,35 dengan kategori memuaskan dan sudah memenuhi target dari yang ditetapkan yaitu sebesar 3,80.

Tabel 30 Perbandingan Realisasi IKU 11 terhadap Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja 2022	Target					Realisasi 2022	Realisasi 2022 Dibanding Target Kinerja 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	4,35	4,35

Berdasarkan tabel di atas, capaian IKU ini jika dibandingkan dengan target jangka menengah Tahun 2024 telah memenuhi target yang diharapkan.

Salah satu upaya efisiensi yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan adalah perubahan metodologi survei yang semula berbasis manual menjadi digital. Dengan adanya perubahan ini terjadi efisiensi bagi internal BPK dan pihak surveyor. Perubahan ini bermanfaat bagi internal BPK antara lain penghematan anggaran, responden lebih banyak sehingga survei lebih representative, dan hasil survei *realtime*. Sedangkan manfaat bagi pihak surveyor berupa efisiensi tenaga surveyor, pengolahan data survei lebih cepat, dan pemantauan pelaksanaan survei *realtime*.

## 12. IKU 12. Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi

Indikator ini bertujuan untuk mendorong pelaksanaan tugas dan fungsi dengan pemenuhan persyaratan kompetensi dalam bentuk pendidikan berkelanjutan Pegawai BPK.

Realisasi capaian IKU ini pada Tahun 2022 dibandingkan dengan capaian Tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 31 Perbandingan IKU 12 Tahun 2022 dan 2021

Indikator Kinerja 2022		Target 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%

Realisasi IKU ini pada Tahun 2022 sebesar 100% telah memenuhi target dari yang ditetapkan yaitu sebesar 100%. Sebanyak 142 pegawai telah memenuhi jam diklat yang ditentukan.



Tabel 32 Perbandingan Realisasi IKU 12 terhadap Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja 2022	Target					Realisasi 2022	Realisasi 2022 Dibanding Target Kinerja 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas, capaian IKU ini jika dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024 telah memenuhi target yang diharapkan.

Salah satu upaya efisiensi yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan adalah melaksanakan diklat secara mandiri di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yang telah disetujui oleh Badan Diklat PKN. Manfaat penerapan diklat secara mandiri antara lain penghematan anggaran untuk perjalanan dinas.

### 13. IKU 13. Tingkat Kinerja Anggaran

Tingkat kinerja anggaran mengukur capaian kinerja atas penggunaan anggaran satuan kerja yang memiliki dokumen anggaran atau DIPA mandiri yang terlihat dari nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA).

EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas aspek implementasi kinerja anggaran tahun berjalan dan tahun sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja anggaran.

EPA adalah rangkaian aktivitas terintegrasi dalam rangka mereviu, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran belanja pada satuan kerja yang memiliki DIPA mandiri berdasarkan PMK 195 Tahun 2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Indikator ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan tersebut.

Realisasi capaian IKU ini pada Tahun 2022 dibandingkan dengan capaian Tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 33 Perbandingan IKU 13 Tahun 2022 dan 2021

Indikator Kinerja 2022	Target 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
13 Tingkat Kinerja Anggaran	88%	89,32%	91,38%

Realisasi IKU ini pada Tahun 2022 sebesar 89,32% telah memenuhi target dari yang ditetapkan yaitu sebesar 88,00%. Penilaian IKU ini meliputi nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) sebesar 85,96% dan nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) sebesar 94,35%. Penilaian kinerja anggaran tersebut dilakukan oleh Biro Keuangan.

Tabel 34 Perbandingan Realisasi IKU 13 terhadap Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja 2022	Target					Realisasi 2022	Realisasi 2022 Dibanding Target Kinerja 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran	87%	87%	87%	87%	87%	89,32%	89,32%

Berdasarkan tabel di atas, capaian ini jika dibandingkan dengan target jangka menengah Tahun 2024 telah memenuhi target yang diharapkan. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.

Tercapainya target kinerja anggaran yang telah ditetapkan disebabkan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan upaya sebagai berikut.

- a. Komitmen bersama dari satker untuk selalu berusaha mencapai target kinerja yang telah ditetapkan; dan
- b. Pengelolaan manajemen kinerja atas aspek implementasi satker yang menjadi bagian penilaian indikator kinerja keluaran.

Untuk mempertahankan capaian kinerja anggaran ini, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan akan melakukan upaya sebagai berikut.

- a. Meningkatkan capaian keluaran dan indikator kinerja keluaran yang berkontribusi terhadap kinerja anggaran;
- b. Melakukan penelaahan kembali atas DIPA/POK BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, dengan melakukan perbaikan terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) pada tiap Rincian Output (RO) dengan memperhatikan penggunaan Bagan Akun Standar (BAS);
- c. Melakukan penyesuaian terhadap DIPA/POK, dengan melakukan revisi terhadap DIPA/POK dengan memperhatikan kebutuhan riil BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan melalui kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Kanwil Ditjen Perbendaharaan, dan/atau DJA;
- d. Memastikan pencapaian volume RO sesuai dengan target kuantitas dan waktu pencapaian atau tepat volume dan tepat waktu;
- e. Menyelesaikan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan target kuantitas, kualitas, dan waktu sesuai dengan Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang telah diinput ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), sehingga pengadaan barang dan jasa tidak menumpuk pada akhir tahun anggaran;
- f. Mempercepat penyelesaian tagihan dari internal dan pihak ketiga sehingga mempercepat proses penggantian uang persediaan dan realisasi anggaran; dan
- g. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh pihak untuk peningkatan kinerja anggaran.

### C. Analisis Efisiensi

Efisiensi yang dilakukan dalam upaya Pencapaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Triwulan IV Tahun 2022 berupa pemanfaatan teknologi informasi.



Salah satunya penggunaan aplikasi *Zoom Meeting* sebagai sarana rapat dan berkoordinasi dengan entitas. Dengan memanfaatkan teknologi melalui *Zoom Meeting*, Satker memperoleh efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya seperti proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan dalam mengantisipasi perubahan yang terjadi di lapangan sehingga dapat memenuhi harapan pemangku kepentingan. Dengan menggunakan aplikasi *Zoom Meeting* dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan akan tetap komunikatif, adaptif, dan kolaboratif terhadap kebutuhan interaksi dan informasi entitas. Hal ini dilakukan untuk menunjang pencapaian Indikator Kinerja.

#### D. Perubahan Budaya Kerja

Pencapaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Triwulan IV Tahun 2022 mendapatkan skor kinerja sebesar 100,15 yang meliputi pencapaian 13 IKU membawa dampak pada perubahan budaya kerja di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.

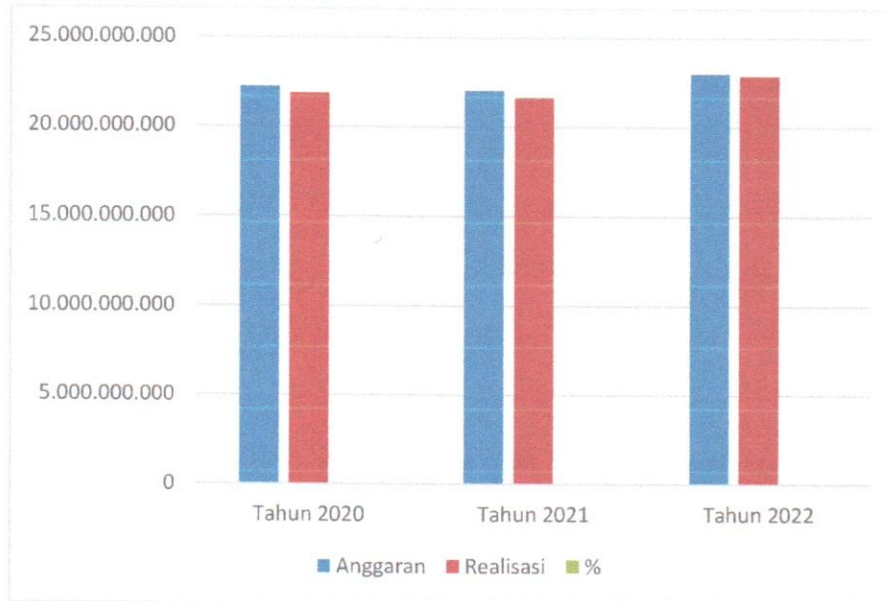
Melalui capaian kinerja pada Triwulan IV Tahun 2022, diharapkan dapat menunjang budaya kerja JUARA (Jujur, Unggul, Amanah, Rasional, dan Ahli) pada pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, antara lain melalui kesesuaian hasil pemeriksaan yang memenuhi harapan penugasan, penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, keterlibatan dalam pemeriksaan tematik nasional dan tematik lokal, dan penerapan manajemen pengetahuan.

#### E. Realisasi Anggaran

Perkembangan anggaran dan Realisasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 s.d. 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 35 Perkembangan Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2020 s.d. 2022

Periode	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Tahun 2020	22.233.075.000	21.856.359.097	98,31%
Tahun 2021	22.049.063.000	21.631.062.727	98,10%
Tahun 2022	23.027.398.000	22.887.537.475	99,39%



Gambar 6 Grafik Perkembangan Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2020 s.d. 2022

## F. Inovasi

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2022 telah membuat Aplikasi Buku Tamu yang sudah diusulkan menjadi *Best Practice*. Aplikasi Buku Tamu ini diberi nama “TamuKita” yang berguna untuk mencatat nama dan keperluan pengunjung ketika mereka berkunjung ke BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan. Sebelumnya pencatatan masih dilakukan secara manual menggunakan buku folio bergaris, sehingga rawan tersobek dan basah, serta rentan keliru dalam penulisan nama tamu. Dengan diterapkannya aplikasi ini terbukti meningkatkan keefektifan tata kelola penerimaan tamu dengan pemanfaatan teknologi informasi dan proses pencatatan buku tamu di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.

Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan juga sudah mengusulkan replika *Best Practice* yang telah dilakukan oleh satuan kerja yang ada di BPK antara lain yaitu Repikasi Pengenalan *Database* Lingkungan Kantor Perwakilan dan Pendampingan bagi Pegawai Baru dan/atau Pegawai Pindah pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dari BPK Perwakilan Provinsi Bangka Belitung.

## G. Penghargaan

Penghargaan yang diterima oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan ditahun 2022 adalah.

1. Daftar Penghargaan Internal yang diperoleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022.

Tabel 36 Daftar Penghargaan Internal BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022

No	Nama Penghargaan	Peringkat	Nama Penyelenggara
1	Pengelola UJDIH Terbaik Tahun 2021	II	Ditama Binbangkum



2	Pengelola Database Peraturan BPK Terbaik Tahun 2021	II	Ditama Binbangkum
3	UJDIH Perwakilan Zona Hijau Tahun 2021		Ditama Binbangkum

2. Daftar Penghargaan Eksternal yang diperoleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022

Tabel 37 Daftar Penghargaan Eksternal BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022

No	Nama Penghargaan	Peringkat	Nama Penyelenggara
1	Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Smt I Tahun 2022 (Pagu Besar)	3	KPPN Banjarmasin
2	Transaksi Kartu Kredit Pemerintah Smt I Tahun 2022 (Nilai UP KKP Besar)	3	KPPN Banjarmasin
3	Laporan Keuangan Smt I Tahun 2022 (Pagu Besar)	2	KPPN Banjarmasin
4	Bendahara Pengeluaran Smt I Tahun 2022 (Pagu Besar) 2 KPPN Banjarmasin	2	KPPN Banjarmasin
5	Kontribusi dalam realisasi PNBPN yang berasal dari pengelolaan BMN tahun 2020-2022		DJKN Kalselteng

## BAB IV PENUTUP

### A. Pencapaian Skor Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Secara Umum

Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan merupakan kontribusi untuk penyusunan Laporan Kinerja AKN VI BPK sebagai perwujudan akuntabilitas pencapaian kinerja, baik keberhasilan ataupun kegagalan dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis organisasi dalam rangka terselenggaranya *good governance* yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

### B. Strategi Pemecahan Masalah serta Rencana Aksi Pemenuhan Target Periode Berikutnya

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan upaya-upaya untuk mencapai target kinerja dan akan terus berusaha mempertahankan kinerja yang sudah memenuhi target serta meningkatkan kinerja pada capaian IKU yang belum memenuhi target dengan cara meningkatkan pemahaman dan penerapan visi, misi dan nilai dasar BPK serta meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerja sama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.

Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja BPK RI di masa mendatang.

Banjarbaru, Januari 2023

**Manajer IKU**



**Saiful Munir**

NIP 197507312002121004

Mengetahui,  
**Kepala Perwakilan**



**Rahmadi**

NIP 196812101996031002